

Analisis Peran Keluarga Masdar Pasmardalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar

Harman Alif S. Pratama (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rahmatullah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: harmanalifsp12@gmail.com

Abstract

This study attempts to analyze the role of the family masdar pasmar in bureaucracy government in district polewali mandar and how the role of a raid in legal-formal in bureaucracy government can run and maintain power. This research using the kind of research in eksploratory qualitative. Scope of research location was conducted in districts Polewali Mandar. The result showed the role of the family Masdar Pasmardalam bureaucracy government can be seen and observed in aspects of power player, include visible and invisible power. The causes of strengthening terjabarkan role in of economic capital, social capital and culturally capital . Strengthening the role of this family pattern government made bureaucratic local Polewali Mandar be bureaucracy with patrimonial pattern.

Keywords: family, role, power, capital, patrimonial

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan keluarga Masdar Pasmardalam birokrasi pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana peranan yang didapatkan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan dapat menjalankan dan memelihara kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara eksploratory. Lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Penelitian menunjukkan peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmardalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan, berupa adanya Visible dan Invisible Power. Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.

Kata kunci: keluarga, peran, kuasa, modal, patrimonial

PENDAHULUAN

Penelitian ini memiliki fokus mengenai fenomena politik pemerintahan di Indonesia dikhususkan di Kabupaten Polewali Mandar. Desentralisasi politik yang tercermin dalam UU No. 22 tahun 1999, menjadikan Keluarga Masdar Pasmardberpengaruh “kuat” dalam politik pemerintahan di lokal Polewali Mandar. Menguatnya pengaruh ini dibuktikan di tiga pemilihan kepala daerah terakhir dan

dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini difokuskan dalam birokrasi pemerintahan untuk melihat bagaimana peranan Keluarga Masdar dan pengaruh yang diberikan. Keluarga Masdar Pasmard di Polewali Mandar memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama dalam politik pemerintahan. Selain tiga Pilkada terakhir, beberapa jabatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di

tingkat birokrasi dijabat oleh keluarga-keluarga Masdar Pasmard.

“Max Weber considers patrimonialism as a form of government centered on family structures, particularly on the authority of fathers in families. It is a form of political domination in which authority rests on the personal and bureaucratic power exercised by a royal household, where that power is formally arbitrary and under the direct control of the ruler”. (fakhar bilal, Mughal Dynasty And Patrimonial Bureaucracy).

Model birokrasi Indonesia, dilihat dari perspektif kultural, merupakan birokrasi yang di balik struktur modernnya masih membawa nilai-nilai budaya patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional. Sebagai birokrasi yang lahir dari kandungan masyarakat tradisional, birokrasi Indonesia lebih mendekati pengertian Weber tentang pola dominasi patrimonial terhadap tipikal masyarakat tradisional, yang ditandai dengan kuatnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan ikatan emosi. (Agus Suryono, 2011)

Keluarga Masdar Pasmard merupakan aktor politik yang memiliki peranan kuat di tingkat lokal. Priyono menyatakan (Van Klinken, 2009) “Ada indikasi kuat bahwa aktor-aktor dominan memang punya akar secara sosial dan politik. Mereka bukan merupakan elite yang terisolasi dan bercokol di puncak negara dan yang bisa dikelilingi dan dikepung oleh masyarakat sipil.”

Terkait fenomena politik lokal, beberapa penelitian telah dilakukan semisal kajian yang dilakukan oleh Zuhro,dkk (2006) mengenai jawara dan kekuasaan dalam pembentukan Provinsi Banten, keterlibatan birokrasi dalam Pilkada jember, sengketa Pilkada depok dan jalan panjang menuju demokrasi, penelitian Andi Faisal Bakti tahun 2004 mengenai kekuasaan keluarga di Wajo Sulawesi Selatan.

Penelitian Andi Faisal Bakti (2004) di Wajo yang dimuat dalam buku politik lokal Indonesia (2007) menggambarkan keterkaitan antara Militer, Golkar, dan Orde Baru. Terdapat

aktor politik Puang (sebutan bergelar bangsawan). Jaringan Keluarga Puang ditempatkan pada ranah birokrasi, dengan posisi jabatan yang “basah”.

Revivalisme Keluarga Puang di ranah pemerintahan semakin terlihat antara tahun 2004, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah diangkat melalui jaringan Keluarga Puang (disebut jalur jati; jalan ke rumah puang, seperti jalan cendana untuk Keluarga Pak Harto). Jalur jati ini merupakan jalur untuk menduduki jabatan pemerintahan strategis di Wajo. Keluarga Puang lainnya menjabat sebagai Kabag perlengkapan. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) semacam kantor dinas pertanian, pajak, transportasi, pertanahan, perhutanan, dipimpin oleh kerabat dan saudara sepupu Puang, 10 dari 14 camat yang ada merupakan kaum bangsawan yang menyatakan memiliki hubungan darah dengan puang. Lapisan atas birokrasi Wajo masa ini dikuasai oleh kalangan aristokrat, 90% menguasai kedudukan yang lebih tinggi dan masuk melalui jalur jati.

Penelitian mengenai kuasa dan budaya juga dilakukan oleh Andi Muhammad Yusuf (2015), tesisnya hegemoni budaya dalam praktik politik dan kekuasaan di Belawa Kabupaten Wajo. Pendekatan antropologi politik etnografi. Penelitiannya menunjukkan otonomi daerah justru berimplikasi menghadirkan tatanan lama kultur orang bugis, menjadikan legitimasi budaya: nilai-nilai yang direproduksi bersinggungan dengan praktik politik semisal assituruseng (nilai budaya orang bugis) yang bermakna legitimasi kuasa dari anakarung. Konteks kultural dari kuasa akan melahirkan berbagai tatanan nilai dan simbol-simbol budaya yang dapat digunakan sebagai instrumen hegemoni kelas penguasa.

Penelitian selanjutnya yang paling dekat dengan konteks daerah penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naswir (2013). Tesis Muhammad Naswir (2013) mengerucut pada tiga klan Manggabarani, Mengga, dan Masdar. Ketiga

klan ini dalam pandangan Naswir merupakan bentukan negara, dengan pendekatan ABRI, Golkar dan Birokrasi. Pendekatan elit dan patronase-klien, logika sumberdaya politik oleh Charles F. Andrain digunakan untuk menjelaskan bagaimana dominasi dapat terpelihara oleh ketiga klan ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sumberdaya politik yang kemudian dijabarkan dalam kekuasaan fisik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan normatif, kekuasaan personal dan kekuasaan keahlian, yang dimiliki oleh ketiga klan ini sangatlah besar sehingga pola sirkulasi elit hanya berputar diantara ketiga klan ini saja. Mempertahankan dominasi mereka dalam masyarakat Mandar, setiap proses elektoral, selain berkontestasi ternyata ketiga klan ini juga sering terjadi kolaborasi sehingga proses politik seolah menutup ruang bagi elit-elit yang lain untuk tampil sebagai pemimpin di Polewali Mandar.

Terhusus mengenai birokrasi pemerintahan, beberapa karya maupun penelitian telah dilakukan, misalnya Peter M Blau (1963), Crozier (1964), Smith (1971), Albrow (1990). Beberapa karya tersebut lebih mengkhhususkan pada aspek kelembagaan birokrasi. Sepanjang penelusuran penulis, penelitian dan kajian terbaru mengenai politik dan birokrasi pemerintahan telah dilakukan oleh Kiki Lutfiah (2012) mengenai Demokrasi dan Kekuasaan di Banten. Studi Kiki Lutfiah (2012) lebih menitikberatkan pada TB Chasan Shohib dalam melanggengkan kuasa dengan menempatkan jaringan keluarga pada jabatan politik dan pemerintahan

Studi yang dilakukan Naswir (2013) dalam hemat penulis hampir sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, namun sedikit perbedaan ialah kajian yang dilakukan Naswir (2013) menitikberatkan pada elit politik dan relasi kuasa yang dibangun oleh ketiga klan di atas. Kajian ini merupakan kajian pengembangan untuk mengamati fenomena politik lokal yang telah dilakukan oleh Naswir (2013). Penelitian ini mencoba untuk memfokuskan

pada Peranan Keluarga Masdar Pasmardar, mengingat Keluarga Masdar Pasmardar cukup berpengaruh dalam politik pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar. Kajian ini diharapkan juga dapat menambah khasanah kajian mengenai fenomena politik pemerintahan di tingkatan lokal, terkhususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

Berangkat dari pengetengahan latar belakang di atas dan uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu serta domain dari birokrasi pemerintahan dari perdebatan struktural hingga kultural, penulis mencoba melihat bagaimana peran kuasa Keluarga Masdar Pasmardar tetap terpelihara melalui modalitas jaringan (birokrasi pemerintahan) dan modalitas simbolik dan kultural (patrimonial) Keluarga Masdar Pasmardar di Kabupaten Polewali Mandar.

Ada tiga alasan yang mendorong mengapa persoalan peran keluarga ini dijadikan fokus kajian. Pertama dalam setiap proses pesta demokrasi semisal Pilkada tidak akan pernah lepas dari eksistensi keluarga ini. Kedua, Desentralisasi politik dan domain dari birokrasi pemerintahan dari perdebatan struktural hingga kultural menarik untuk dikaji disebabkan besarnya pengaruh Keluarga Masdar Pasmardar di Kabupaten Polewali Mandar. Ketiga, Keluarga Masdar Pasmardar dalam sistem strata sosial memiliki kedudukan yang tinggi dalam pelapisan masyarakat Polewali Mandar dan memiliki peran yang sangat menentukan dalam struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah observasi melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari informan atau menemukan ruang lingkup dan fokus persoalan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

tatif dengan pendekatan penelitian secara eksploratif/eksploratory.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Keluarga Masdar Pasmardalam Birokrasi Pemerintahan Daerah

Keluarga Masdar Pasmard yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah segenap jaringan keluarga yang memiliki hubungan darah dan hubungan terikat yang didasarkan pada perkawinan dan hubungan kekerabatan dengan Keluarga Masdar Pasmard dikhususkan dalam birokrasi pemerintahan.

Latar belakang Keluarga Masdar Pasmard di Mandar dimulai dari Mara qdia Tapango, H.A Paselleri (1926) yang menikah dengan Hj. A. Sitti Tarattu (Mara qdia towaine Tapango) yang melahirkan putra tunggal Muhammad Darasa (HM Darasa), yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi mara qdia Tapan go. HM Darasa kemudian mempersunting Hj.Masyurah (Putri Andi Oddang Makkarumpa) yang melahirkan putra tunggal yang diberi nama Masdar Pasmard. Nama ini terambil dari kata Mas (Masyurah) dan Dar (Darasa). Pas dari nama Paselleri dan Mar dari nama Makkarumpa.

Masdar Pasmard kemudian menggantikan ayahnya menjadi mara qdia Tapango, ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Polmas (sekarang Polman) tahun 1999-2003 (Bupati saat itu Hasyim Maggabarani; masih bersepepu dengan Masdar Pasmard). HM Masdar Pasmard mempersunting H.A Suriani Pasilong, putri dari pasangan A. Pasilong (paqbicara Kaiyyang Kerajaan Balanipa) dan Hj.Sitti Hadara Puang towaine. Pasangan Andi Pasilong dan Hj. Sitti Hadara dikaruniai dua putra dan tiga putir yakni : Andi Patajangi pasilong (mantan Camat Campalagian), Andi Suryani Pasilong (istri Masdar Pasmard), Andi Saad Pasilong (mantan bupati polmas), Hj.Andi Nuraeni Pasilong (manta camat Tinambung) dan Hj. Andi Hebawaty Pasilong (Istri mantan wakil bupati majene Alm. Andi

Sulaiman Balimalipu). Mereka adalah cucu dari Laju Kanna Doro Arajang Balanipa ke-50.

Perkawinan antara Masdar Pasmard dan H.A Suriani Pasilong dikaruniai enam putra dan dua putri. Andi Ali Baal MP, Andi Ibrahim MP, Andi Nursami MP, Andi Baso MP (almarhum), Andi Irwan MP, Andi Kufliaty MP (almarhum), dan Andi Masri MP. Jaringan keluarga inilah yang menunjukkan peran nya dalam ranah politik pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar. (Musaddad, 2007).

ABM lebih dikenal karena pengalamannya yang cukup mumpuni dalam birokrasi pemerintahan. Pengalaman Ali Baal MP dimulai dari tataran CPNS/PNS di Kab. Polmas tahun 1984, Kasi Litbang Bappeda Polmas 1996–2000, Camat Tapango, 2000-2002, Sekretarsi Bappedalda Kab. Polmas 2002-2004, Bupati Polewali Mandar 2004-2008, Bupati Polewali Mandar 2009-2014, Calon Gubernur Sulawesi Barat 2011. (Musaddad, Aco 2007)

“Saya berkarier semenjak jadi pegawai golongan II, sekolah penyesuaian akhirnya terus berjenjang lagi jadi saya juga pernah menjabat seckam, pernah menjabat kelurahan, pernah menjabat desa juga terus camat tiga tahun saya pindah ke lingkungan hidup seblumnya itu saya staff ortala organisasi dan tata laksana hukum dan organisasi pulang jadi camatlah, berjenjang memang jadi saya sudah ini jadi saya tahu semua di bawahkan”. (wawancara Ali Baal Masdar, 04 Juni 2016)

Adiknya, Andi ibrahim MP saat ini menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar, pilkada tahun 2008 ia juga sempat maju dan berkontestasi dengan kakaknya Andi Ali Baal MP namun kalah dalam pertarungan. Andi Ibrahim juga tercatat sebagai ketua DPD partai Golkar.

Andi Nursami MP saat ini tercatat sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Kariernya dalam birokrasi pemerintahan dimulai sebagai Ka. Sub. Seksi Akomodasi tahun 1996, Kasi Pengembangan & Pelestarian Budaya Daerah tahun 2000,

Kasi. Pembinaan Seni Budaya tahun 2007, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Kalo saya di birokrasi pemerintahan de saya tahun, walaupun saya sebenarnya saya mengganti almarhum bapak tapi saya melalui proses tes dan itu selama proses itu kami menunggu sampai 2 tahun baru betul-betul ada pernyataan lulus , kami sempat di istilahnya apa ya dulu itu litsus itu di kantor gubernur dan itu dia melalui proses tahapan yang boleh dikata susah lah waktu itu . pra jabatan saya juga pertama tahapan pertama waktu itu tahap percobaan waktu itu pra jabatan di pakatto 2 bulan dan saya masuk jadi staff dan saya melalui jenjang kepangkatan”. (Wawancara Andi Nursami Masdar, 02 Mei 2016).

Andi Masri MP juga tercatat sebagai Kepala bagian administrasi dan pemerintahan umum di sekretariat daerah. Studi sarjananya di dapatkan di STA – LAN RI dan lulus tahun 2005 dengan konsentrasi studi Manajemen pembangunan daerah. Kariernya dalam birokrasi pemerintahan dimulai Sekretaris Lurah tahun 2009, Lurah Polewali tahun 2010, Kabid PLS Disdikpora, dan saat ini menjabat sebagai kepala bagian pemerintahan di sekretariat daerah.

Andi baso MP (alm) juga sempat menjadi ketua DPD Partai Gerindra di Kabupaten Polewali Mandar dan menguasai beberapa perusahaan di Polewali Mandar. Terkhusus untuk Andi Ali Baal MP, istrinya dan anaknya tercatat sebagai anggota legislatif tingkat Provinsi dan Kabupaten yang berasal dari Partai Gerindra.

HM Masdar Pasmard yang mempersunting Andi Suryani Pasilong yang merupakan putra paqbicara kayyang Andi Pasilong menjadikan jaringan keluarga ini semakin menguat. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan beberapa informan menyebut, beberapa jaringan keluarga ini merupakan salah satu jaringan keluarga terbesar di polewali mandar.

Sejarah meyakini, Keluarga Masdar Pasmard memiliki garis kekerabatan baik secara vertikal maupun horisontal yang cukup besar. Keluarga ini terlibat dalam konteks politik lokal sejak zaman kerajaan dimulai. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Aco Musaddad, seorang akademisi (antropolog) dan cukup banyak mengetahui mengenai jaringan keluarga ini di Polewali Mandar.

“Jadi kalo kita memperbincangkan Keluarga Masdar di bidang aspek sosial dan budaya, soalnya juga tidak terlepas dari aspek politik maupun pemerintahan. Karena dari kerajaan tempo dulu, Masdar Pasmard ini kan sebenarnya keturunan aruang tapango, aruang tapango itu kan salah satu keturunan dari kerajaan aruang tapparitti na wai, salah satunya ialah kerajaan Tapango. Jadi pa Masdar itu adalah ayahnya salah satunya raja, juga seorang birokrasi tempo dulu dari sebuah kerajaan tapango, sebenarnya sumbernya dari situ ya.” (Wawancara Aco Musaddad, 13 April 2016).

Konteks birokrasi pemerintahan, seperti yang diungkap Weber dengan organisasi legal-formal menurutnya juga menuntut adanya status-peran yang dimainkan oleh birokrat (pejabat). Peran atau peranan ini di dapatkan dari tugas dan wewenang yang terlembagakan secara legal-formal dalam birokrasi pemerintahan daerah. Birokrasi dapat dilihat dari aspek sistem, organisasi, jiwa dan aparat birokrasi pemerintahan.

Konteks kajian ini, melihat status-peran yang terlembagakan dalam birokrasi pemerintahan, cenderung memiliki implikasi terhadap penguatan kuasa dan pemeliharaan kuasa.

Kuasa atau “*power*” memiliki ragam bentuk, secara material maupun simbolik. Salah satu ilmuwan sosiologi-politik yang membahas mengenai hal ini ialah Steven Lukes (2005) dengan karyanya *third face of power*.

Visible Power dalam Birokrasi Pemerintahan

Visible power dapat kita amati dengan keterlibatan keluarga ini dalam birokrasi pemerintahan dan beberapa menempati jabatan strategis. Jaringan keluarga yang besar dalam birokrasi pemerintahan ini telah menjadi modal sosial bagi penguatan agen atau kelompok agen sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan.

“Kalo yang saya bisa bahasakan ke anda secara kasat mata, birokrasi pemerintahan diisi hampir diatas 40% diisi oleh keluarga ini ya ini karena inilah secara genetiknya kan, teori keturunan, patrilineal matrilineal. Dia semua, mauki apa ini? Cobami, mulai dari sepupu 1 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Kan memang kan dari ibu banyak i bersaudara, kalo ini sendiri dia, tapi sepupunya, kalo bukan lagi dari ibunya dari bapaknya”. (Wawancara Nrd 16 mei 2016/aparat birokrasi pemerintahan/akademisi).

Mengenai *Visible Power* ini, penulis kemudian melakukan wawancara dengan Ali Baal Masdar yang merupakan anak dari masdar pasmar. Konsep Kuasa yang dimiliki dan peranannya dalam birokrasi pemerintahan, ia menjabarkan dan menyebutnya dalam petikan wawancara berikut.

“Jadi pemimpin itu pertama itu harus konsisten, na sanga mandar apa na poloa iya na polia. Satu kata dengan perbuatan. Yang kedua harus mendengarkan aspirasi rakyat yang ketiga harus disinilah kita berperan karena anggaran terbatas, sumberdaya terbatas sehingga kemauannya rakyat itu banyak sekali berbeda-beda sehingga kemampuan kita itu kadang-kadang tidak cukup mestilah kita bagaimana memmanage apa yang ada baik sumberdaya maupun sumber pendanaan itu kita memperanan disitu, saya tetap yang prioritaskan ya misalnya yang pertama yang menyagkut hak hak manusia kemudian saya prioritaskan hak hak sipil kemudian agar semuanya bisa berperan saya membuka cakrawala kebebasan jangan ada ketakutan

jadi rakyat tidak bisa takut sama pimpinannya mereka bebas tapi tentu dalam koridor budaya tentu kita kan punya budaya”. (wawancara Ali Baal Masdar, 04 Juni 2016)

Persepsi lain yang patut untuk diperhatikan ialah persepsi dari aparat birokrasi pemerintahan yang juga terlibat saat periode ABM menjabat sebagai Bupati Polman. Penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang pensiunan aparat birokrasi pemerintahan dan cukup terlibat lama dalam birokrasi pemerintahan.

“Periode kedua memang ada utamanya penanganan masalah pendidikan, infrastruktur namun itu belum maksimal. Pengamatan kita melihat kondisi daerah dari aspek anggaran itu minim juga ya.” (Wawancara Naam, 02 Mei 2016/Pensiunan aparat birokrasi pemerintahan/tokoh masyarakat).

Jabatan-jabatan strategis ini merupakan suatu kuasa yang didapatkan melalui pelembagaan legal-formal. Strategis yang dimaksudkan ialah, kuasa ini memiliki potensi yang besar sebagai instrumen menguatnya status atau kuasa. Jabatan strategis dengan menduduki kepala dinas yang masih memiliki aspek layanan dasar dalam aturan perundangan juga satu hal yang menjadikan peranan keluarga ini dalam birokrasi pemerintahan cukup kuat dan berpengaruh.

Hidden Power dalam Birokrasi Pemerintahan

Bentuk kuasa yang kedua yakni *Hidden power*. Konsep ini diperkenalkan oleh Bachrach dan Baratz (1962) yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan agenda politik yang sedang terjadi, sehingga memungkinkan untuk memberikan pengaruh terhadap seseorang atau kelompok. Kuasa jenis ini tersembunyi dan berasal dari kemampuan agen untuk dapat memberikan pengaruh baik melalui otoritas dan lainnya.

“Ya kalo yang kami temukan di beberapa dinas atau kantor itu salah satunya misalnya kalender, kalender itu menggunakan pasa-

ngan calon yang sebenarnya itu tidak boleh ada baik itu di instansi pemerintah, masjid maupun sekolah. Tapi kami temukan di beberapa dinas ada kalender yang ada nama pasangan calon, dan mengharapkan dukungan. Kedua yang kita temukan juga adalah dari beberapa program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, biasanya apa itu melalui rapat saat memulai atau mengakhiri rapat biasanya ada pesan-pesan yang mereka lakukan untuk mengingatkan mendukung pasangan calon yang bersangkutan". (Wawancara S, 18 April 2016/ Panwaslu di 2 pemilukada terakhir)

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah dari perspektif aktor yang memainkan peranan dalam birokrasi pemerintahan. Saat penulis melakukan wawancara formal dengannya mengenai legitimasi yang ia miliki dalam birokrasi pemerintahan, Ali Baal Masdar menyebutkan:

"Ya itulah semuanya karena saya mampu bekerja keras dan mampu memberi contoh, mampu mengakomodasi semua kemauan masyarakat, mampu semuanya". (Wawancara Ali Baal Masdar, 04 Juni 2016).

Jenis Kuasa yang dimilikinya dan terlembagakan secara legal formal merupakan salah satu kuasa yang tersembunyi dan sangat berpotensi menjadi instrumen menguatkan peranan dalam domain birokrasi pemerintahan. Kuasa menurutnya ialah kemampuannya untuk mengakomodasi mengenai keinginan dan kemampuannya dalam memimpin.

Invisible Power dalam Birokrasi pemerintahan

Bentuk ketiga dari kuasa yang teramat sangat besar untuk berpotensi menjadi instrumen penguatan peranan adalah *invisible power*. Kuasa ini secara tak sadar atau tidak dikenali telah terinternalisasikan ke dalam pikiran dan tubuh dari orang-orang.

Jadi kau dulu kesana ke rumahnya puang Ali minta izin baru saya mau, saya juga

keluarganya tapi kan saya tidak bisa, tidak punya kewenangan (nda boleh, harus ada) .

Power in the third dimension makes reference to John Stewart Mill's work on socialisation, Pierre Bourdieu's concept of habitus, and Antonio Gramsci's notion of ideological hegemony. The idea of the third dimension is that the greatest form of control occurs when domination appears natural and unchangeable. (Angela, 2013)

"Jadi dia memang lahir itu, mua diang disanga dio kempimpinan biya-wiya nna. (R menambahkan turunannya memang) dia memang itu dari sono nya memang". (wawancara grup terfokus dengan tiga orang aparat birokrasi pemerintahan 19 april 2016 ; A.H, R, dan A.J.)

Keluarga ini juga memiliki *invisible power* yang telah terinternalisasikan ke dalam diri aparat birokrasi pemerintahan.

"Saya panggil kau mau lagi jadi Gubernur lawan saya? Andi ibrahim lagi kau nda lawan apalagi saya? (tertawa) bilang i iye puang, Bupati lagi saya susah saya hanya jaga suaraku jadi biarmi saya begini tidak tonja itu maju". (Wawancara Ali Baal Masdar, 04 Juni 2016).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ali Baal Masdar, saat penulis wawancara, ia mengemukakan akan niatnya untuk mencalonkan sebagai Gubernur Sulbar. Ia mengemukakan kehebatan dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh dan kuasa terhadap orang lain yang juga ingin maju dalam kontestasi politik semisal Pilgub. Ia banyak bercerita mengenai kepemimpinannya saat menjabat sebagai bupati polman dua periode.

Faktor Penyebab Menguatnya Peranan Dalam Birokrasi Pemerintahan, diantaranya:

1) Desentralisasi Politik: Menguatnya Peranan. Keluarga Masdar Pasmal senyatanya dalam lingkaran keluarga besar telah memiliki pengaruh yang cukup besar di Polewali Mandar, tetapi dalam lingkup keluarga inti

kekuasaan diperoleh setelah adanya desentralisasi politik.

Karim (dalam Juanda Nawawi 2012) menyebut devolusi sebagai desentralisasi politik. Ini karena terjadi wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Menurutnya devolusi sering pula disebut sebagai *democratie dezentralisation* karena terjadinya penyerahan wewenang, kekuasaan kepada lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih atas dasar pemilihan. Konsep desentralisasi baik dalam bidang politik maupun administrasi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Keberhasilan keluarga ini yang memenangkan pilkada 2004 juga sangat dipengaruhi oleh sosok Masdar Pasmard yang merupakan kader partai Golkar yang cukup lama memberikan pengaruh dalam politik lokal di polewali mandar. Pilkada 2004 di Polewali Mandar waktu itu, masih di tingkatan DPRD kabupaten/kota.

Pilkada 2004 oleh DPRD ini, ditandai oleh pertarungan tiga klan besar di polman yakni Manggabarani, Mengga, dan Masdar. Klan manggabarani diwakili oleh Hasyim Manggabarani yang merupakan mantan bupati polmas periode 1999-2003 dan klan mengga dan klan Masdar Pasmard diwakili oleh kalangan muda yakni Aladin S.Mengga dan Ali Baal Masdar.

“Setelah dia itu pegang bapaknya Golkar itu, disitu mulai. Masdar sakit kan calon dulu sama sama itu, Masdar sakit, meninggal masdar, beralih ke ya anaknya itu, kan dulu enak karena anggota DPRD memilih pemilihan DPRD, karena anggota kan dulu golkar itu di dominasi. andai kata dulu itu pemilihan langsung belum itu, tapi lolos dia karena pemilihan langsung karena dikuasai mi disitu mi mulai ali baal itu. Sehingga dua periode”. (Wawancara A.L 12 mei 2016/ mantan anggota DPRD Polmas).

Keluarga Masdar Pasmard dalam lingkaran keluarga inti baru menunjukkan peranan di era desentralisasi politik, tetapi dalam ling-

karan keluarga besar mereka telah memiliki pengaruh yang cukup besar di Polewali Mandar. Konteks bupati Polewali Mandar dari periode pertama hingga saat ini, diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Keluarga Masdar. Hal ini tidak dapat disalahkan dan ini mungkin merupakan salah satu strategi yang dikembangkan oleh keluarga ini untuk memperkuat kekuasaan mereka. Keluarga ini di istilahkan orang mandar sebagai to marappang atau jaringan keluarga yang besar. (Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan); 2) Modal-Modal Keluarga Masdar Pasmard. Dalam arena sosial, selalu ada yang memiliki pengaruh berlebih dan tidak. Hal ini tidak terlepas dari status yang dimiliki oleh agen atau kelompok agen. Ini juga tidak lepas dari situasi dan sumber daya yang dimilikinya.

Modal Ekonomi

Keluarga-keluarga Masdar Pasmard dalam birokrasi pemerintahan memiliki kecukupan modal ekonomi, dan ini dapat dipertukarkan dengan modal kultural mereka yakni berupa jenjang pendidikan yang mereka peroleh. Jaringan keluarga ini dalam lingkaran inti memiliki kecukupan modal ekonomi, dalam wawancara pribadi dan grup terfokus yang penulis lakukan dengan beberapa informan menyebut keluarga ini memang memiliki kecukupan modal ekonomi.

“Sebenarnya ini, sebenarnya dia kaya dari turun temurun dia kaya tidak ada di Polman ini dari nenek neneknya ini dia punya empang 300 hektar, sawahnya apanya semua ada dia”. (Wawancara formal ahmad saifuddin/ keluarga Masdar Pasmard dalam birokrasi pemerintahan/10 mei 2016)

Modal ekonomi lain yang patut untuk ditelaah secara mendalam ialah mengenai kepemilikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di dua kecamatan di lokal Polewali Mandar. Menurut salah seorang informan yang penulis temui dan melakukan wawancara, keluarga ini memiliki dua per-

tamina yang dibangun di periode kepemimpinan Ali Baal Masdar. Pertamina ini berada di Kecamatan Polewali dan Kecamatan Wonomulyo.

"Dua itu (pertamina), periode pertama dibangun polewali. Periode kedua itu di wonomulyo". (Wawancara A.L/tokoh masyarakat/ mantan anggota DPRD Polmas/ 12 Mei 2016)

Modal ekonomi dapat digunakan mempertahankan kekuasaan, mengapa hal ini penting? beberapa informan menyebut izin untuk mendirikan SPBU di daerah juga berkaitan erat dengan kepala daerah. Sementara untuk pendapatan SPBU sendiri, berapa kira-kira yang dapat dihasilkan dari modal ini?

"*Corporate Secretary* Pertamina Ali Munkadir mengatakan omzet 1 SPBU dalam satu hari bisa mencapai Rp 67,5 juta sampai dengan Rp 1,35 miliar. Angka itu dengan ketentuan masing-masing SPBU menjual 15.000-30.000 liter BBM bersubsidi dalam satu hari, dengan harga per-liter Rp 4.500. "Dengan margin penjualan BBM bersubsidi Rp 703,45 per-liter, maka laba kotor SPBU Rp 10,55 juta sampai Rp 21,1 juta per-hari,"

Modal Sosial

Modal sosial yang dimaknai dalam konteks kajian ini adalah segenap modal jaringan yang digunakan sang agen dalam menentukan status-peranan dalam arena. Modal ini mungkin lebih tepat digunakan untuk mendeskripsi mengenai modal jaringan keluarga yang besar dan masih berasal dari keturunan bangsawan dan juga modal jaringan keluarga yang terlibat aktif di birokrasi pemerintahan.

"Memang ini keluarga ini berkecimpung, ada Mandarnya ada Pattaenya, ada Bugisnya". (Wawancara grup terfokus dengan aparat birokrasi pemerintahn, 19 april 2016).

Pandangan beberapa pihak yang penulis wawancara dari DPRD, Pengamat Politik Lokal, mengatakan hal ini tidak dapat disalahkan karena dari awal mereka berstatus sebagai PNS, jaringan keluarga dan memang

memiliki rekatan-rekatan keluarga yang besar dan tidak dalam posisi strategis. Strategis yang dimaksudkan tidak dalam posisi-posisi yang basah. (Wawancara Fariduddin dan syariat, 15 April, 12 Mei 2016)

"Keluarganya sih iya tapi ya itu tadi dia punya keluarga yang memadai di Polewali Mandar kalo orang mandar menyebutnya itu apa ya tomarappang, marappang i memang keluarga na sehingga ya siapapun dia ada saja ikatan-ikatan keluarga ketika ditarik silsilahnya pasti ketemu". (Wawancara syariat 12 mei 2016).

Modal sosial berupa jaringan keluarga ini di satu sisi juga tak dapat disalahkan tapi di sisi lain juga menjadi polemik, di sisi lain kelompok agen diuntungkan dengan menempati jabatan yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Jabatan strategis yang dimaksudkan berperan dalam mengakumulasi dan mereproduksi status-peranan dalam arena. Akumulasi dan reproduksi terjadi dalam penguatan jaringan anggota agen yang satu dan agen yang lain. Modal jaringan lain yang juga dimiliki oleh keluarga ini adalah jaringan organisasi Pramuka, Partai Golkar, Partai Gerindra.

"Kalo Pa Masdar juga ketua Pramuka selama 32 tahun, tahun 71 (1971) sampai dia meninggal. Kalo pa Masdar Pasmardulu itu, sebelum ke kantor biasa tinggal 2 jam dulu di cadika sebelum ke kantornya". (Wawancara informal Hamzah Haya, 14 april 2016. Pramuka/ketua DPRD Polman).

Faktanya hari ini Ketua DPRD juga dari Pramuka Pa Hamzah yang dalam catatannya juga Pramuka membumi hampir di semua wilayah semua guru-guru menjadi bahagian wilayah, dari Pramuka itu mereka memiliki strukturnya sampai ke tingkat bawah, terlepas dari apakah itu dimanfaatkan bagi kepentingan politik itu adalah hal lain yang pasti itu adalah salah satu modal sosial minimal. (Wawancara N.M, A.L dan Syariat/11 April, 10 Mei, dan 12 Mei 2016).

“Seandainya Keluarga Masdar tidak masuk di Golkar, tidak masuk di Pramuka, otomatis tidak besarmi kayak sekarang”. (Wawancara N.M 11 april 2016/akademisi/aparat birokrasi pemerintahan).

Andi Ali baal Masdar Pasmard terpilih sebagai bupati Polewali Mandar periode pertama melalui pleno di dprd mengendarai partai golkar. Andi ibrahim Masdar Pasmard terpilih sebagai anggota DPRD 4 periode mengendarai partai golkar dan sebagai Bupati Polewali Mandar.

Karena keluarga Masdar Pasmard ini bergerak di semua aspek, ada yang menguasai politik tetapi tidak menguasai ekonomi, ada yang menguasai ekonomi tetapi tidak menguasai modal sosial. Nah beliau ini, politiknya masuk, ekonominya masuk kemudian birokrasinya masuk. (Wawancara dengan beberapa informan).

Modal Kultural

Modal kultural yang dimaksud dalam penelitian ini adalah modal budaya yang diperoleh dari turunan keluarga yang memiliki cukup peran penting dalam politik pemerintahan di lokal Polewali Mandar. Modal ini diperoleh dari lamanya kedudukan agen dalam dunia sosial dan internalisasi agen akan nilai-nilai yang tertanam dalam keluarganya. Modal kultural ini di satu sisi juga dapat dikaitkan dengan habitus si agen untuk memasuki arena atau field.

“(R menjawab : dari dulu) Kalo keluarga Masdar ini dalam birokrasi sejak dari dulu, sejak dari pa Masdar. (R menambahkan memang ketua DPRD dulu) Bupati pertama sampai sekarang ini masih dikuasai terikat hubungan darah dengan Keluarga Masdar, dari Pa Abdullah Madjid, Pa Mengga sampai sekarang ini, (ditambahkan oleh A.H: Cuma anu yang tidak pa Cuma kube dauda yang tidak). Kalo dari segi kepemimpinan itu, ya dia lahir dari keluarga kepemimpinan. (R menambahkan biya toto ria immai seiya biya toto i)”. (Wawancara grup terfokus dengan

aparap birokrasi pemerintahan, 19 April 2016).

Mengenai motivasi dan keterlibatan dalam birokrasi pemerintahan, saya kemudian menanyakan hal ini kepada keluarga-keluarga masdar.

“Kan kakak Andi Ali memang sudah jadi pegawai. Kalo pa Andi Ibrahim kan memang tidak ada niat masuk ke pemerintahan, jadi saya lah pada waktu itu pas selesai kuliah ada penggantian itu saya di dorong bapak daripada mubazzir saja, ya kasi masuk berkas ya untung-untungan saja lulus apa nggak, tapi kan memang dulu memang pada jamannya bapak itu tahun-tahun berapa itu kan memang penggantian sangat mudah ji, kalo orangtua sudah pensiun kita bisa mengganti”. (wawancara formal, Andi Nursami Masdar Pasmard 04 Mei 2016).

Petikan wawancara diatas merupakan salah satu anak dari Masdar Pasmard yang saat ini menjabat sebagai Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Polewali Mandar. Jawaban yang sama saya peroleh dari keluarga-keluarga Masdar Pasmard yang lain.

“Iya semuanya semuanya dari motivasi keluarga dari diri sendiri, ya kita juga berpikir ya kalo ada kesempatan ini kenapa kita tidak coba untuk ambil dengan baik”. (wawancara Ahmad Syaifuddin, 10 mei 2016).

Keterlibatan Ali Baal Masdar Pasmard dalam birokrasi pemerintahan juga masih di pengaruhi oleh sang ayah. Hal ini di buktikan dalam salah satu petikan tulisan di buku biografinya. Karena desakan sang ayah, akhirnya ABM terdaftar sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1984 di era pemerintahan S.Mengga sebagai Bupati Polewali Mamasa (Musaddad, 2007).

Modal kultural ini terus menerus diakumulasi dan direproduksi dalam arena. Salah satu caranya adalah pelibatan dalam birokrasi pemerintahan.

“Kalo di keluarga itu kami kan ada 6 bersaudara, 7. Yang 5 laki 2 perempuan, tapi satu perempuan masih balita sudah menda-

hului kita. Jadi memang bapak itu kalo bapak itu dari pemerintahan, ibu murni dari ibu rumah tangga, bapak mendidik kita disiplin. Di keluarga kami yang 6 bersaudara itu terbagi, 3 jadi kami ada di pemerintahan 3 di politik 2 juga ada di pengusaha. Awalnya memang pa Bupati sekarang dia itu awalnya memang dia pengusaha kemudian terjun di politik. Kalo pa ABM birokrasi Karena kan memang dulu pns masih bisa berpolitik. Kalo memang saya pas selesai terjun ke pemerintahan sama pa ABM". (Wawancara Andi Nursami Masdar, 02 Mei 2016).

Konstruksi klan tidak terlepas dari pondasi kokoh yang telah dibangun oleh leluhur pertama, mereka menciptakan tradisi, mengatur garis keturunan, merancang jaringan kekerabatan, maupun membuat aturan kehidupan. Aturan yang paten sangat sulit untuk dibantah maupun disusupi isu, sehingga minim sekali terhadap konflik internal klan. Alasan tersebut yang menjadikan klan atau jaringan tetap kuat dan mampu bertahan pada level kekuasaan yang lebih dominan. Klan dalam melakukan transformasi membutuhkan modal sosial untuk mengekspresikan ikatan-ikatan patrimonial seperti kekerabatan. Meminjam pendapat Coleman, modal sosial yang paling efektif adalah "hubungan dibangun sejak lahir". (Field, 2010 : :32)

Modal Simbolik

Kepemilikan modal ekonomi yang terjabarkan dalam kepemilikan berupa harta kekayaan, kepemilikan rumah mewah, kendaraan, tambak luas, dan SPBU Pertamina. Kepemilikan modal sosial yang terjabarkan dalam jaringan keluarga yang besar, jaringan keluarga yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan, penguasaan organisasi sosial dan partai politik. Kepemilikan modal kultural yang terlembagakan dalam disposisi (kecenderungan, niat) tahan lama dalam tubuh seperti keterlibatan dalam politik pemerintahan.

"Jadi kalo memang orang lain lawan ini susah, karena dari faktor ekonomi dari faktor keluarga, tapi kadang-kadang orang bilang bukan Andi Ibrahimnya tapi dari pa Masdar dari nenek-neneknya". (Wawancara grup terfokus dengan aparat birokrasi pemerintahan, 19 april 2016).

Modal simbolik ini juga dapat diturunkan ke agen yang lain, dari nama besar dan pengaruh yang dimiliki oleh Masdar Pasmari yang banyak terlibat dalam politik pemerintahan di periode sebelumnya kemudian diturunkan ke anaknya Ali Baal MP. Hal ini sesuai dengan yang diungkap F.S.

"Pengaruh, karena dilihat dari atasnya. Yang dari bapaknya diturunkan. Bapaknya kan di bidang Birokrasi. Birokrasi memang, nanti baru sudah birokrasi baru mereka terjun ke politik. Dia yang sebagai apa namanya itu disini, pedoman penghayatan pemuda pancasila. Kalo bicara birokrasi keluarganya dia memang, dan diturunkan ke Ali Baal, Ali Baal yang pegang itu, ya Andi Ibrahim kan politik. buktinya saja, saat dia sudah tidak jadi bupati, dia panggil kepala-kepala desa itu datang, coba kau pigi di Matakali itu. dia luar biasa dia itu". (wawancara dengan F.S, 02 Mei 2016).

Habitus dan Doxa

Habitus merupakan produk dari sejarah, sebagai warisan dari masa lalu yang di pengaruhi oleh struktur yang ada. Habitus sebagai produk dari sejarah tersebut, menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Habitus yang dimaknai dalam bahasan ini ialah pengaruh nilai-nilai kekerabatan yang masih terbawa dalam lingkup birokrasi pemerintahan.

"Sejauh ini ya begitu, selalu sistem klan sebelumnya kita mengenal Hasyim, Manggarani kan keluarga Manggarani lalu kemudian klan Mengga lalu hari ini ya Masdar. ini karena dipengaruhi problem pemilih kita kan masih banyak pemilih-

pemilih tradisional, mereka lebih ke patron-klien. Kira-kira seperti itulah jadi ya kecenderungannya ya kecenderungan rekatan-rekatan kekeluargaan dan ini banyak berpengaruh". (Wawancara Syariat pada 12 Mei 2016/pemerhati politik lokal)

Pandangan aparat birokrasi pemerintahan yang penulis wawancara secara informal dan saling bergantian untuk memberikan informasi menyebut hal ini sangat sulit untuk dihilangkan, dan mereka menerima hal semacam ini dan menyebut ini terjadi di setiap daerah, bukan hanya di lokal Polewali Mandar saja.

"Disiplin struktur jabatan, ya disini ini sedikit ya itu tadi tentang pengisian jabatan yang masih diwarnai spoil sistem, kawan dan kekeluargaan. Ya kita tau tentu di Mandar ini masih di warnai perasaan-perasaan masih di warnai dengan siapa dia masih ada itu, masih diwarnai sifat kekeluargaan". (Wawancara grup terfokus dengan aparat birokrasi pemerintahan 19 April 2016).

Pandangan atau informasi yang sama juga diungkap oleh salah seorang penggiat lembaga swadaya masyarakat yang fokus memperhatikan mengenai aparat birokrasi pemerintahan. Pandangan atau persepsi yang ia berikan hampir sesuai dengan yang diungkap oleh beberapa informan lain. Lokal Polewali Mandar masih terjebak dalam tatanan masyarakat tradisional-modern.

"Kalo kita kan disini antara modern dan tradisional, ya masih begitulah. Karena masih terbawa oleh tradisi-tradisi yang tidak berakhir sejak dulu". (Wawancara, Andi Rasyid 02 Mei 2016 /LSM LPAN dan wartawan).

Doxa dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk penerimaan secara langsung oleh aparat birokrasi pemerintahan dan tanpa mempertanyakan penengaruh keterlibatan keluarga ini dalam birokrasi pemerintahan. Selain karena modal jaringan keluarga yang besar dan telah terbangun cukup lama, doxa juga berkaitan dengan modal kultural yaitu berupa penerimaan

orang-orang karena keluarga ini memang biya-wiyan.

"Jadi biasa itu orang de, secara kasat mata negatif i. Kenapa dia semua? Lihatko dulu historisnya. Liatko dulu, jadi wajar i kalo dia cetuskan mesa kenne". (Wawancara informal Nrd / aparat birokrasi pemerintahan, 16 Mei 2016).

Informasi atau persepsi yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintahan diatas merupakan satu bentuk penerimaan dan kewajaran berkaitan dengan menguatnya peranan keluarga ini dalam birokrasi pemerintahan. Doxa bekerja dan tidak disadari oleh kelompok subordinasi dan menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Hal ini juga sangat berkaitan dengan jejaring keluarga ini yang memang cukup besar dan terlibat aktif dalam birokrasi pemerintahan.

Birokrasi Pemerintahan Daerah: Pertentangan Struktur dan Kultur

Desentralisasi yang bersifat devolusi, terlalu membuka ruang yang begitu besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang akhirnya dipersepsikan secara sempit dengan multitafsir dari setiap daerah. Otonomi daerah tidak memunculkan harapan untuk melahirkan birokrasi yang berbasis pada rakyat (people-based bureaucracy), tetapi malah muncul ethnic-based bureaucracy. (Blasius, dkk)

"Ya tidak ada pola, tradisional maksudnya birokrasi lampau, karena itu menjadi tradisi kan? Turun temurun". (Wawancara Nrd, 16 Mei 2016).

Hal diatas merupakan pandangan dari aparat birokrasi pemerintahan di salah satu SKPD di lokal Polewali Mandar. Menurutnya masih terdapat pola-pola tradisional dalam birokrasi pemerintahan daerah dan sulit untuk dilepaskan. Birokrasi semacam ini sering di identikkan dengan *bureau-pathology*.

"Di undang-undang kan sangat jelas tapi ketika berada di bawah-bawah itu penerapannya belum, masih terdapat beberapa

kelemahan, misalnya penempatan beberapa pejabat, ini kan masih dalam proses pembelajaran. Metode sebenarnya bagus cuman persoalannya daerah. (Wawancara Andi Rasyid, 02 Mei 2016/LSM Lembaga Pengawasan Aparatur Sipil Negara/wartawan lokal).

Birokrasi pemerintahan daerah di satu sisi merupakan bagian dari eksekutif daerah, akan tetapi di sisi lain ia merupakan pelayan publik dan mengabdikan untuk publik. Dikotomi antara politik – pemerintahan – administrasi menjadi hal utama dalam bahasan ini. Birokrasi pemerintahan, apakah hanya menyoal pada menjalankan visi-misi yang dituangkan oleh kepala daerah dan terlegitimasi dalam pemilukada atau di sisi lain birokrasi merupakan bagian yang menyatukan partikular dan universal tersebut?

“Eksekutif ditanya sebagai pengguna nya kalo kita ini kan dari sisi makronya bahwa siapa orang yang tepat menempati posisi lebih kepada kewenangannya eksekutif tetapi lebih kepada sumbang saran terkait track record nya seseorang, bupati sejauh ini juga menerima sumbang saran tetapi apapun juga ini sudah ada mekanismenya, baperjakat misalnya jadi penempatan orang per orang di dalam jabatan tertentu itu benar-benar harus sesuai dengan kapabilitas sesuai dengan latarbelakang”. (wawancara fariduddin, 15 April 2016/ ketua komisi IV DPRD/ anggota DPRD 2 periode).

Birokrasi pemerintahan seakan-akan menjadi milik dari pemerintah, birokrasi selajaknya adalah milik negara yang terejawantahkan kepada daerah melalui desentralisasi administrasi. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, relasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Politik birokrasi, kalau boleh dikatakan demikian,

adalah politik kenegaraan dan bukan politik kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Peran atau peranan Keluarga Masdar Pasmard dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dan diamati dalam aspek-aspek kuasa yang dimainkan. *Visible power* dapat dilihat dari peranan yang diperoleh berdasar pada status dan posisi dalam birokrasi pemerintahan dan terlembagakan secara legal-formal. *Invisible power* dapat diperhatikan dari internalisasi aparat birokrasi pemerintahan yang mengatakakan biaya-wiya keluarga ini memang cukup lama terlibat dalam birokrasi pemerintahan; b) Faktor penyebab menguatnya peranan terjabarkan dalam modal-modal berupa modal ekonomi yang dapat dilihat dalam kepemilikan tambak, tanah, dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Modal Sosial terjabarkan dalam jaringan keluarga besar, orang mandar menyebutnya dengan *to marappang*, dan jaringan keluarga ini memiliki posisi-posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan, jaringan partai politik Golkar dan organisasi sosial pramuka. Modal Kultural terjabarkan dalam disposisi (tendensi, kecenderungan), keterlibatan keluarga besar dalam politik pemerintahan berdasar sosio-historis. Kepemilikan modal-modal ini kemudian bertransformasi menjadi modal simbolik yang berperan dalam meningkatkan prestise dari tiap anggota keluarga. Modal sosial (modal jaringan partai politik, organisasi sosial, dan jaringan keluarga) merupakan modal yang paling dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menguatkan peranan yang dimiliki oleh keluarga ini. Menguatnya peranan keluarga ini menjadikan corak birokrasi pemerintahan di lokal Polewali Mandar menjadi birokrasi dengan corak patrimonial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. (2012). *Agen dan struktur dalam pandangan pierre Bordieu*. Jurnal Biokultur volume I: 2, hal 91 – 110.
- Adorno, Theodore & Marx Horkheimer Dkk., (2001). "Chapter 30"- *How to be a Sport Fan –Pierre Bordieu-*. The Cultural Study Reader. Routledge: Taylor and Francis Group.
- Alimuddin, Ridwan. (2011). *Mandar : Alam, Budaya, Manusia*. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.
- Amin, La Ode Muhammad. (2013). *Netralitas birokrasi pemerintahan dalam pemilukada di kota makassar (Pemilihan Walikota makassar tahun 2008*. Skripsi Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Amir, (2010). *Kelaskaran di Mandar*. Makassar : Dian Istana.
- Arief, Hasrat. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian & Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Arifin, Indar. (2010). *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Bayu, Wirawan. (2012). *Jaringan Keluarga Yasin Limpo dalam penguatan kekuasaan Syahrul Yasin Limpo*. Skripsi Sarjana. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bilal, Fakhar. (2015). *Mughal Dynasty of India and Patrimonial Bureaucracy*. JRSP, Vol. 52: 1, January-June.
- Blasius, dkk. *Karakter Birokrasi Lokal : Penelitian Studi Determinasi Struktural Dan Kultural Pada Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Ngada*. Yayasan Peduli Sesama (Sanlima)&Ford Foundation.
- Bourdieu, Pierre. (1989) .*Social Space and Symbolic Power*. Jurnal sociological theory. Vol 77: 1, hal 14-25.
- Bourdieu, Pierre. (1986). *The forms of capital. Chapter 1-2. Richardson, j., handbook of theory and research for the sociology of education*. Westport, ct: greenwood, pp. 241–58
- Brinkerhoff, Derick W and Goldsmith. (2002). *Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework for Assessment and Programming*. Cambridge, MA
- Buroway, Michael. (2012). *The Roots of Domination: Beyond Bourdieu and Gramsci*. Berkeley, USA : University Of California. Sagepub.
- Creswell, John. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset ; edisi terj*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwizatmiko. (2010). *Kuasa simbolik pierre bordieu : Telaah filosofis*. Skripsi sarjana. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Field, John. (2011). *Modal sosial ; edisi terj*. Kreasi wacana.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Galih, Prasetyo Agus. *Pengantar Birokrasi Klasik: Hegel, Marx dan Weber*. Tidak diterbitkan.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit Suatu Bahasa Pengantar*. Yogyakarta : JPP Press.
- Haryanto. (2014). *Klanisasi Demokrasi dalam Politik Lokal di Indonesia (Studi Kasus: Qahhar Mudzakkar dan Politik Klan di Sulawesi Selatan)*. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Heywood, Andrew. (2013). *Politik : Edisi ke-4; terj*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Hidayat, Syarif. (2007). *Too Much To Soon :Local State Elite's Perspective On And The Puzzle Contemporary Indonesia Regional Autonomy Policy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Konversi modal sosial menuju modal politik. Tugas Kuliah Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Angk. XIV (2007).
- Lawang, Robert. (1985). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Karunika Universitas terbuka.
- Lele, Gabriel Phil, Dkk. *Panduan Penulisan Akademik Fisipol UGM*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lexy, J Moleong. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lukes, S. (2005). *Power, a radical view*. London: Macmillan.
- Martini, Rina. (2012). *Buku Ajar Birokrasi dan Politik*. Universitas Diponegoro : Lembaga pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Marzuki, dkk. *Model Birokrasi Pemerintah Daerah Era Otonomi Daerah*. Tidak diterbitkan.
- Masri, Andi MP dkk. (2012). *Ali Baal Masdar Pasmars: Sosok, Gagasan dan Tindakan*. Polewali Mandar: Pustaka Media Paqbana.
- McCabe, Angela C. (2013). *A three-dimensional analysis of power and engaged scholarship*. School of Management QUT Business School.
- Musaddad, Aco. (2008). *Ali Baal Masdar Pasmars: The Leader of Change*. Yogyakarta: Todilaling centre.
- Musaddad, Aco. (2007). *Ali Baal MP : Pemimpin Visioner dan Rakyat*. Yogyakarta : The Mandarlogy centre of Jogjakarta.
- Naswir, Muhammad. (2013). *DOMINASI POLITIK DI MANDAR (Sebuah Studi Tentang Fenomena Tiga Klan di Kabupaten Polewali Mandar)*. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.
- Nawawi, Juanda. (2012). *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Makassar: CV. Menara Intan.
- Nordholt, H. S. & G. van Klinken. (2007). (eds) *Politik Lokal di Indonesia (edisi terj.)*. Jakarta: KITLV - Yayasan Obor Indonesia.
- Kartawijaya, Pipit. (2006). *Pemerintah Bukanlah Negara, Studi Komparasi administrasi Pemerintahan RI dengan Negara*. Jerman: Henk Publishing.
- Prayudi. (2013). *Posisi birokrasi dalam persaingan politik pemilukada*. Jakarta: Pusat pengkajian pengolahan data dan informasi (PD3I).
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. (1998). *Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: UGM.
- Ritzer, George. (2008). *Teori Sosiologi Modern : Edisi Keenam (edisi terj.)*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar; Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suryono, Agus. (2011). *Pendekatan Kultural dan Struktural dalam Realitas Birokrasi Indonesia*. Tidak diterbitkan.
- Swartz, David. (1997). *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Thoha, Miftah. (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusrialis. (2012). *Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keprihatinan dan Harapan)*. Jurnal Sosial Budaya Dosen Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. 9.

Yusuf, Andi Muhammad. (2015). *Hegemoni Budaya dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa Kabupaten Wajo*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Zuhro, R. Siti, Dkk. (2006). *Demokrasi Lokal dan Pilkada*. Jurnal Demokrasi dan HAM. Jakarta: LIPI Press.

Undang – Undang:

Undang – Undang RI No.5 tahun 1974

Undang – Undang RI No.22 tahun 1999

Undang – Undang RI No. 23 tahun 2014 / Undang – undang no.9 tahun 2015

Undang – Undang RI Aparatur Sipil Negara no.5 tahun 2014

Undang – Undang RI Pokok-pokok Kepegawaian no.43 tahun 1999

Perda No. 8 tahun 2009 Organisasi tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD kabupaten Polewali Mandar.

Perda No. 9 tahun 2009 Organisasi dan tata kerja inspektorat, bappeda dan lembaga teknis daerah kabupaten polewali mandar

Situs:

Polewalimandarkab.go.id

Sindonews.com

E-koranmandar.com

Berita8.com

Partaigerindra.or.id

Golkarsimalungun.com

Merdeka.com

Powercube.net